

PRESS RELEASE PIMPINAN

PRESS RELEASE

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pemerhati peradilan, salah satu tahapan untuk mendorong adanya suatu perubahan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, melalui pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan.

Zona Integritas yang dibangun merupakan komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah melaksanakan pencaanangan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 disaksikan oleh Forum Forpinda Jawa Barat, yaitu Asda 1 Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesos Provinsi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Kepala TU Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Hukum Kodam III Siliwangi, Kabag. RB Polda Jawa Barat.

Korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Dalam rangka penanggulangan korupsi dikalangan birokrasi, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mengeluarkan regulasi Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM. WBK atau WBBM adalah proses atau suatu cara untuk menjadikan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah menjadi sebuah *Island of Integrity* atau Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK-WBBM harus menjadi *pilot project* dan *benchmark* bagi unit kerja lainnya dan harus diberi reward dalam bentuk tunjangan/remunerasi yang lebih dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

-----Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat-----